

C.3 URUSAN PILIHAN

1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sektor perikanan menjadi salah satu andalan dalam upaya peningkatan kesejahteraan, penyerapan tenaga kerja dan pemenuhan gizi bagi masyarakat. Potensi perikanan Jawa Tengah relatif besar, yaitu jumlah produksi perikanan tangkap sebesar 274.469 ton dengan nilai Rp8,75 Triliun, merupakan jumlah produksi terbesar urutan ke-8 secara nasional. Sedangkan untuk perikanan budidaya, jumlah produksinya sebesar 485.689 ton dengan nilai Rp10,32 Triliun, menempati urutan ke-5 secara nasional.

Dalam rangka melindungi kepentingan nelayan yang merupakan salah satu program unggulan Gubernur Jawa Tengah telah dilakukan berbagai upaya antara lain pemberian bantuan sarana prasarana perikanan tangkap (bubu, rumah ikan, *global positioning system*, jaring dan mesin) guna mengurangi penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan, serta bantuan premi asuransi sebesar Rp1,706 Miliar bagi sebanyak 10.000 nelayan kecil dan tradisional yang pernah mendapatkan Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan namun tidak melanjutkan secara mandiri.

a. Realisasi Indikator Kinerja Program

Untuk mewujudkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Jawa Tengah, dilaksanakan melalui 5 program yaitu Pengembangan Perikanan Tangkap, Usaha dan Pengembangan Komoditas, Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir, Pengawasan dan Pengelolaan SDKP, dan Penguatan Daya Saing dan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan, yang terdistribusi kedalam 24 indikator kinerja program. Perincian ketercapaian dari 24 indikator tersebut disajikan dalam Lampiran Indikator Kinerja Program Urusan Kelautan dan Perikanan L-I.B.1.1-4.

Dari lampiran Indikator Kinerja Program Urusan Kelautan dan Perikanan L-I.B.1.1-4 dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Pengembangan Perikanan Tangkap memiliki 12 indikator. Semua indikator tingkat ketercapaiannya adalah sangat tinggi; 2) Program Usaha dan Pengembangan Komoditas memiliki 3 indikator. Semua indikator tingkat ketercapaiannya adalah sangat tinggi; 3) Program Pengelolaan Ruang Pesisir dan Laut memiliki 3 indikator. Tingkat ketercapaiannya adalah sebanyak 2 indikator (66,67%) memiliki tingkat ketercapaian sangat tinggi dan 1 indikator (33,33%) tingkat ketercapaian tinggi, 4) Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan memiliki 4 indikator. Semua indikator tingkat ketercapaiannya adalah sangat tinggi; 5) Program Penguatan Daya Saing dan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan memiliki 2 indikator. Semua indikator tingkat ketercapaiannya adalah sangat tinggi.

Secara keseluruhan, dari 24 indikator terdapat 23 indikator (95,83%) memiliki tingkat ketercapaian sangat tinggi dan 1 indikator (4,17%) memiliki tingkat ketercapaian tinggi. Uraian berkaitan dengan indikator kinerja program dan tingkat ketercapaiannya disajikan dalam Tabel berikut ini:

No	Nama Program	Jumlah Indikator	Tingkat Ketercapaian				
			Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
1	Pengembangan Perikanan Tangkap	12	12	-	-	-	-
2	Usaha dan Pengembangan Komoditas	3	3	-	-	-	-
3	Pengelolaan Ruang Pesisir dan Laut	3	2	1	-	-	-
4	Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	4	4	-	-	-	-
5	Penguatan Daya Saing dan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	2	2	-	-	-	-
Jumlah		24	23	1	-	-	-

Keterangan:

Tingkat Ketercapaian Kinerja dihitung dengan kategori sebagai berikut:

- 1) Sangat Tinggi : $\geq 91\%$
- 2) Tinggi : 76 – 90,99%
- 3) Sedang : 66 – 75,99%
- 4) Rendah : 51 - 65,99%
- 5) Sangat rendah : $\leq 50,99\%$

Uraian berkenaan dengan pelaksanaan program adalah sebagai berikut:

Program Pengembangan Perikanan Tangkap, memiliki 12 indikator kinerja program (1 indikator di Dinas Induk dan 11 indikator di Pelabuhan Perikanan Pantai), dengan tingkat ketercapaian semua indikator sangat tinggi, antara lain: Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Bajomulyo, realisasi 81,82% melebihi dari target 72,73%; Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Lohgending dengan realisasi 81,82% sesuai target; Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Morodemak dengan realisasi 72,73% sesuai target; Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tawang, realisasi 81,82% melebihi dari target 54,55%. Tingginya tingkat capaian sebesar 149,99% diantaranya karena adanya penambahan 3 Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dilaksanakan yaitu *docking* kapal, *logbook* kapal perikanan dan rekomendasi bahan bakar minyak bersubsidi; serta produksi perikanan tangkap, realisasi 495.356,22 ton melebihi dari target 393.150 ton. Tingginya tingkat capaian sebesar 126% disebabkan penggunaan teknologi penangkapan ikan, penggunaan freezer/refrigerator sehingga hasil tangkapan tidak banyak yang terbuang, penenggelaman rumah ikan dan menurunnya *Illegal Unreported Unregulated (IUU) fishing*.

Sebaran capaian indikator kinerja produksi perikanan tangkap di kabupaten/kota tertinggi di Kabupaten Batang sebesar 122.363 ton (24,70%) dan terendah di Kota Surakarta sebesar 0,64 ton (0,00012%).

Penyelenggaraan program pengembangan perikanan tangkap mempunyai manfaat adanya peningkatan produksi perikanan tangkap melalui pengembangan fungsi pelabuhan sebagai pusat aktifitas perekonomian masyarakat nelayan, pemberian sarana dan prasarana penangkapan ikan ramah lingkungan (jaring dan bubu), *coolbox*, alat bantu navigasi, serta bantuan premi asuransi bagi nelayan kecil.

Program Usaha dan Pengembangan Komoditas, memiliki 3 indikator kinerja program (1 indikator di Dinas Induk dan 2 indikator di Balai), dengan tingkat ketercapaian semua indikator sangat tinggi, yaitu: Persentase penanganan kasus hama penyakit ikan dengan realisasi 100% sesuai target; Persentase peningkatan produksi benih, realisasi 37,1% melebihi target 5%. Tingginya tingkat capaian sebesar 742% disebabkan optimalnya proses pembenihan ikan karena adanya pengadaan induk di loka-loka serta penerapan teknologi yang didukung sumber daya manusia yang berkompeten; dan Produksi perikanan budidaya, realisasi 513.365,27 ton, melebihi target 464.608,41 ton.

Sebaran capaian indikator kinerja produksi perikanan budidaya di kabupaten/kota tertinggi di Kabupaten Brebes sebanyak 73.247,73 ton (14,27%) dan terendah di Kota Surakarta sebanyak 44,001 ton (0,008%).

Penyelenggaraan program usaha dan pengembangan komoditas mempunyai manfaat terkendalinya kasus penyebaran hama dan penyakit ikan melalui upaya penanganan yang intensif, serta peningkatan produksi benih ikan berkualitas.

Program Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir, memiliki 3 indikator kinerja program dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi sebanyak 2 indikator dan tinggi 1 indikator.

Indikator dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu: Persentase kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan efektif dengan realisasi 15% sesuai target dan Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan taruna pesisir, realisasi 33,33% melebihi target 10%. Tingginya tingkat capaian 333,3% disebabkan optimalnya dukungan masyarakat dan stakeholder terkait dalam upaya pemberdayaan perempuan dan taruna pesisir.

Indikator dengan tingkat ketercapaian tinggi adalah persentase peningkatan produksi garam, realisasi 4,06% dari target 5% dengan tingkat capaian 81,2%. Hal ini terjadi sebagai dampak dari musim kemarau panjang.

Sebaran capaian indikator kinerja produksi garam di kabupaten/kota tertinggi di Kabupaten Pati sebanyak 351.736,825 ton (44,34%) dengan luas lahan 2.974,75 ha.

Manfaat penyelenggaraan program pengelolaan ruang laut dan pesisir pada meningkatnya jumlah perempuan dan taruna pesisir, serta meningkatnya produksi garam.

Program Pengawasan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) memiliki 4 indikator kinerja program (1 indikator di Dinas Induk dan 3 indikator di Cabang Dinas), dengan tingkat ketercapaian semua indikator sangat tinggi, yaitu: Persentase jumlah kasus pelanggaran pengelolaan sumberdaya kelautan perikanan yang ditindaklanjuti dengan realisasi 1% sesuai target; Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai selatan Jawa Tengah dengan realisasi 10% sesuai target; Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai utara barat Jawa Tengah dengan realisasi 10% sesuai target; dan Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai utara timur Jawa Tengah, realisasi 10,97% melebihi target 10%.

Manfaat penyelenggaraan program pengawasan pengelolaan SDKP melalui kerjasama dengan POLAIR Polda Jawa Tengah dan Pos Angkatan Laut adalah menurunnya jumlah pelanggaran pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) 573 (Pantai Selatan) dan 712 (Pantai Utara) Jawa Tengah, dan meningkatnya keamanan konsumsi pangan hasil olahan SDKP.

Program Penguatan Daya Saing dan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan memiliki 2 indikator kinerja program (1 indikator di Dinas Induk dan 1 indikator di Balai) dengan tingkat ketercapaian semua indikator sangat tinggi, yaitu: Persentase peningkatan dokumen kelayakan mutu, realisasi 122,1% melebihi target 10% tingginya tingkat capaian disebabkan meningkatnya kesadaran produsen akan pentingnya legalitas hasil perikanan yang baik; dan Persentase peningkatan produksi hasil olahan ikan, realisasi 8,82% melebihi target 5%. Tingginya tingkat capaian 176,4% disebabkan meningkatnya penjaminan kesehatan dan mutu ikan serta keamanan pangan melalui penerbitan sertifikat CPIB (Cara Penanganan Ikan Yang Baik) bagi 46 unit *supplier*/pemasok bahan baku yang ada di wilayah Jawa Tengah.

Penyelenggaraan program penguatan daya saing dan logistik hasil kelautan dan perikanan mempunyai manfaat meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi produk hasil perikanan dan menjaga kualitas produk perikanan, serta meningkatnya keragaman olahan hasil perikanan sebagai sumber protein hewani.

Adapun realisasi sebaran indikator kinerja di 35 kabupaten/kota sebagaimana Lampiran: L-I.E.12.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Anggaran Urusan Kelautan dan Perikanan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 sejumlah Rp99.016.524.000,00, diampu oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, dengan rincian: **Belanja Tidak Langsung** sejumlah Rp42.604.524.000,00 dan **Belanja Langsung** sejumlah Rp56.412.000.000,00 untuk membiayai pelaksanaan 5 program dengan realisasi fisik sebesar 99,99% dan keuangan 96,03%.

1) Belanja Langsung

Program Pengembangan Perikanan Tangkap, alokasi anggaran sejumlah Rp20.887.000.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 99,96% dan keuangan 96,98%. Kegiatan yang mendukung program tersebut antara lain: Kegiatan Pengendalian Penangkapan Ikan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan dengan keluaran meningkatnya ketersediaan sarana prasarana perikanan tangkap yang diberikan kepada masyarakat sejumlah 130 unit, dan sebanyak 2.513 unit kapal perikanan terdaftar sebagai kapal perikanan <10 GT; Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Prasarana PPP Bajomulyo Kelas A dengan keluaran meningkatnya kualitas pelayanan melalui penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sebanyak 3.209 dokumen, pelayanan perijinan sejumlah 286 unit, serta persentase peningkatan hasil pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha sebesar 2%; Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Prasarana PPP Karimunjawa Kelas B dengan keluaran meningkatnya kualitas pelayanan melalui penerbitan SPB sebanyak 727 dokumen, pelayanan perijinan sebanyak 29 unit, serta persentase peningkatan hasil pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha sebesar 26%; Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Prasarana PPP Tegalsari Kelas A dengan keluaran meningkatnya kualitas pelayanan melalui penerbitan SPB sebanyak 2.237 dokumen, pelayanan perijinan sebanyak 616 unit, serta persentase peningkatan hasil pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha sebesar 14%; Kegiatan Kepelabuhanan dan Kenelayanan dengan keluaran antara lain meningkatnya kondusifitas melalui perlindungan bagi 10.000 nelayan, semakin optimalnya pengelolaan pelabuhan perikanan melalui pelaksanaan kesyahbandaran di 11 lokasi PPP, dan penerapan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) di 1 lokasi PPP.

Program Usaha dan Pengembangan Komoditas, alokasi anggaran sejumlah Rp11.200.000.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 96,05%. Kegiatan yang mendukung program tersebut yaitu: Kegiatan Pengembangan Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A dengan keluaran meningkatnya kualitas pelayanan melalui produksi benih bermutu sebanyak 8.101.000 ekor, produksi induk unggul sebanyak 7.254 ekor, dan pemenuhan standar teknis pada 1 unit laboratorium; Kegiatan Pengembangan Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A dengan keluaran meningkatnya ketersediaan ikan melalui produksi benih bermutu

sebanyak 13.558.200 ekor, serta produksi ikan konsumsi air payau dan laut sebanyak 12,87 ton; Kegiatan Pengembangan Komoditas dengan keluaran meningkatnya kualitas pembudidayaan ikan melalui sertifikasi CPIB kepada 13 unit pembenihan ikan, sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) kepada 64 unit pembesaran ikan, serta pemberian bantuan sarana dan prasarana perikanan budidaya kepada 12 Kelompok Pembudidaya Perikanan (Pokdakan).

Program Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir, alokasi anggaran sejumlah Rp5.050.000.000,00 dengan realiasi fisik sebesar 100% dan keuangan 92,18%. Kegiatan yang mendukung program tersebut yaitu: Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dengan keluaran meningkatnya penggunaan teknologi di tambak garam seluas 3.262,6 Ha, serta meningkatnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) perempuan dan taruna pesisir melalui pemberdayaan sebanyak 250 orang; Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut dengan keluaran meningkatnya pemahaman peraturan tata ruang laut bagi sebanyak 250 *stakeholder*, dan penerbitan 2 dokumen peraturan tindak lanjut Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

Program Pengawasan dan pengelolaan SDKP, alokasi anggaran sejumlah Rp13.975.000.000,00 dengan realiasi fisik sebesar 100% dan keuangan 96,73%. Kegiatan yang mendukung program tersebut yaitu: Kegiatan Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pengelolaan SDKP dengan keluaran meningkatnya koordinasi melalui pelaksanaan 50 kegiatan Forum Koordinasi Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan, meningkatnya pemahaman peraturan perikanan kepada 300 orang, dan meningkatnya kondusivitas melalui penyelesaian 10 kasus konflik dengan pertemuan antisipasi konflik antar nelayan; Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A dengan keluaran meningkatnya kualitas ekosistem laut melalui penanaman sebanyak 112.800 batang bibit mangrove, dan semakin optimalnya pelaksanaan pengawasan melalui penemuan 10 pelanggaran; Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A dengan keluaran meningkatnya kualitas ekosistem laut melalui penanaman sebanyak 200.000 batang bibit mangrove, serta optimalnya pelaksanaan pengawasan dengan penemuan 45 pelanggaran; Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A dengan keluaran meningkatnya kualitas ekosistem laut melalui penanaman 84.500 batang bibit mangrove, serta optimalnya pelaksanaan pengawasan melalui penemuan 8 pelanggaran.

Program Penguatan daya saing dan logistik hasil kelautan dan perikanan, alokasi anggaran sejumlah Rp5.300.000.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 94,04%. Kegiatan yang mendukung program tersebut yaitu: Kegiatan Pengembangan Logistik, Bina Mutu dan Diversifikasi Produk dengan keluaran meningkatnya kualitas SDM perikanan melalui pembinaan kepada 250 orang dan 10 Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar), serta meningkatnya pemahaman masyarakat melalui kampanye Gemarikan kepada 5.000 orang; Kegiatan Pengembangan Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A dengan keluaran meningkatnya pelayanan melalui penerbitan 186 rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), 5 dokumen Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) SNI, dan 817 sertifikat hasil uji (CAT) mutu produk perikanan.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci sebagaimana Lampiran: L-II.B.1.1-7.

2) Belanja Tidak Langsung

Dinas Kelautan dan Perikanan mengelola hibah uang sejumlah Rp235.000.000,00 yang seluruhnya telah diterimakan kepada sebanyak 10 Pokdakan tersebar di Kabupaten Cilacap, Pekalongan, Klaten, Purworejo, Karanganyar, Sragen dan Purbalingga dengan nominal bervariasi antara Rp15.000.000,00 - Rp50.000.000,00 per masing-masing Pokdakan.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD

Terhadap Urusan Kelautan dan Perikanan pada LKPJ Gubernur TA 2018, DPRD Provinsi Jawa Tengah merekomendasikan perlunya dilakukan sosialisasi kepada para nelayan agar dalam penangkapan ikan tidak menggunakan alat tangkap ikan cantrang, disamping itu juga harus adanya kepedulian masyarakat dalam memanfaatkan kawasan pesisir.

Rekomendasi DPRD Provinsi Jawa Tengah tersebut telah ditindaklanjuti dengan sosialisasi alat penangkapan ikan (API) ramah lingkungan yang dapat dijadikan sebagai alternatif pengganti alat tangkap yang tidak ramah lingkungan (antara lain *gillnet*, bubu lipat untuk ikan dan rajungan, *trammel net*, rawai dasar, *handline*) di 4 lokasi PPP, yaitu Pemalang, Tegal, Rembang, dan Kendal serta pembukaan gerai perijinan di 8 lokasi PPP, yaitu Rembang, Pati, Pemalang, Demak Batang, Pekalongan, dan Kota Tegal guna memfasilitasi pengurusan ijin perubahan alat tangkap cantrang.

Selain hal tersebut, guna mengoptimalkan pengelolaan sumber daya perikanan juga telah dilakukan upaya mewujudkan perijinan yang cepat mudah dan murah yaitu dengan digitalisasi perijinan yang langsung dapat diakses secara mandiri oleh pemohon melalui portal: eservice.dkp.jatengprov.go.id; menyelenggarakan gerai perijinan secara terpadu dengan beberapa instansi terkait yaitu KSOP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jateng, Syahbandar dan/ atau Pengawas Perikanan selaku penerbit SLO dan SPB; serta pelatihan teknik operasionalisasi API ramah lingkungan.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 1) Pemberlakuan regulasi pembatasan penggunaan alat tangkap cantrang berdampak terjadinya konflik nelayan;
- 2) Terjadinya *moral hazard* nelayan agar terbebas dari pengurusan dokumen perijinan dan pembayaran retribusi dengan cara penurunan *Gross Tonase* (GT) kapal hingga <10 GT;
- 3) Menurunnya kualitas benih bermutu karena terdampak musim kemarau panjang;
- 4) Menurunnya kualitas produk olahan berbahan baku ikan (dari hasil tangkapan dan budidaya);
- 5) Masih tingginya pelanggaran pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Solusi

- 1) Sosialisasi regulasi penggunaan alat tangkap ramah lingkungan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan serta pembukaan gerai perijinan untuk memfasilitasi perubahan ijin kapal;
- 2) Perlunya cek ulang fisik kapal yang melakukan proses perijinan;
- 3) Perbenihan ikan dengan menggunakan inovasi/teknologi budidaya dengan penggunaan air yang minimal;
- 4) Pelatihan nilai tambah produk olahan berbahan baku ikan bagi kelompok pengolah dan pemasar;
- 5) Pelaksanaan operasi pengawasan di laut dan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku.